



PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE BARU (REZIM SOEHARTO) TERHADAP SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA

Mutiara Yuliana Pratiwi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang
mutiarapратиwi@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sistem ekonomi pada masa Orde Baru (Pemerintahan Soeharto) terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Reformasi bidang politik dan ekonomi menjadi prioritas utama pada masa Orde Baru. Terutama program pemerintah yang berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat 2) Pengenalan sistem Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), salah satu rencana Suharto, menunjukkan pentingnya komponen pemerataan saat ini yaitu Strategi yang menekankan pada pertanian disertai dengan pemerataan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 3). Program Repelita berdampak besar pada proses pembangunan ekonomi, seperti terlihat pada tahun 1984, ketika Indonesia mencapai swasembada beras, penurunan kemiskinan, peningkatan angka kematian bayi, dan peningkatan sektor industri. 4) Selain itu, program Keluarga Berencana (KB) telah efektif dalam menekan pertumbuhan penduduk.

Kata kunci : *Perkembangan, Peningkatan, Ekonomi*

ABSTRACT

This study aims to examine the development of the economic system during the New Order (Soeharto Government) in the economic sector in Indonesia. The method used in this research is a historical research method. The results of the study show that: 1) Political and economic reforms were the main priorities during the New Order era. In particular, government programs that are oriented towards efforts to save the national economy, particularly efforts to control inflation, save state finances and safeguard the people's basic needs 2) The introduction of the Repelita system (Five-Year Development Plan), one of Suharto's plans, shows the importance of the current equity component, namely a strategy that emphasizes agriculture along with equitable development to meet the basic needs of the community. 3}. The Repelita program had a major impact on the process of economic development, as seen in 1984, when Indonesia achieved self-sufficiency in rice, reduced poverty, increased infant mortality, and increased the industrial sector. 4) In addition, the Family Planning (KB) program is effective in suppressing population growth.

Keywords: *Development, Improvement, Economy*

PENDAHULUAN

Namun, strategi pertumbuhan Orde Baru dikritik karena terlalu terpusat atau terfokus. Istilah "sentralistik" di sini digunakan untuk menggambarkan kutanya pengaruh pemerintahan pusat yang ada di Jakarta dan mengabaikan suara dari pemerintahan daerah. Pada masa Orde Baru (1997-1998) sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang luas dimulai. Dalam sejarah Indonesia, ungkapan "Orde Baru" mendapat sambutan yang tinggi. Model perencanaan pembangunan yang nyata berdasarkan penalaran ekonomi telah dibuat selama periode ini yang pada periode sebelumnya belum pernah dilakukan (Dwicahyo, 2013). Kemampuan masyarakat untuk menyatakan partisipasinya dalam sistem perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru sangat terkendala. Mengapa demikian? Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai keterlibatan masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oleh elit kelas penguasa dalam pertumbuhan, yang mengarah pada ketidakadilan sosial. Keberadaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang sangat parah tidak dapat dimanfaatkan untuk metode pembangunan yang terlalu sentralistik ini karena akan berujung pada jatuhnya Orde Baru.

Orientasi pembangunan Indonesia terfokus pada pembangunan ekonomi ketika era Orde Baru dimulai. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak luar biasa tinggi. Selain itu, perekonomian rezim Orde Baru tidak lagi lumpuh. Akibatnya, kebangkitan Orde Baru disebut sebagai pemulihan ekonomi Indonesia. dimulai dengan pertumbuhan infrastruktur, pertanian, dan pendapatan per kapita. Pada awal program Orde Baru, pemerintah berkonsentrasi pada prakarsa ekonomi nasional, khususnya upaya pengendalian inflasi, pengamanan negara, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1996 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun (Dwicahyo, 2013). Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Perekonomian Indonesia telah menurun secara signifikan pada pertengahan tahun 1960-an. Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, menyebabkan masalah politik yang kini merugikan perekonomian negara. Soekarno, yang tidak menghabiskan hidupnya dalam politik, mulai memiliki perhatian serius terhadap ekonomi. Keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara Barat menyebabkan hiperinflasi yang tidak terkendali, yang merupakan salah satu tindakannya yang kemudian berdampak parah pada perekonomian. Soeharto, yang menggantikan Sukarno pada pertengahan tahun 1960-an, secara signifikan mengubah arah kebijakan ekonomi negara. Tiga tahap perkembangan ekonomi Indonesia yang berbeda di bawah rezim Orde Baru Soeharto dapat dibedakan, masing-masing dengan kebijakan khusus yang ditargetkan pada tahap perkembangan ekonomi tertentu. Yaitu: (1) pemulihan ekonomi (1966–1973); (2) pertumbuhan ekonomi yang pesat dan intervensi pemerintah yang meningkat (1974-1982); dan (3) pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1996).

Rezim Orde Baru memulihkan hubungan positif dengan Barat dan hubungan dengan ideologi yang dipengaruhi komunisme. Pemerintah pada awalnya melakukan rehabilitasi ekonomi dalam negeri serta pemulihan ekonomi, sosial, dan politik sebelum memulai rencana pembangunan melalui REPELITA. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan inflasi, menghilangkan defisit keuangan, dan memulihkan aktivitas produksi seperti ekspor yang melambat di bawah Orde Lama. Agar upaya pemerintah ini dipandang baik oleh negara-negara barat, maka disusunlah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) secara bertahap dengan sasaran yang tepat.

Mengingat perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pada saat ini, era Orde Baru dapat dianggap sebagai titik balik dalam sejarah negara. Pada awal Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang

sangat pesat. dimulai dengan pertumbuhan infrastruktur, pertanian, dan pendapatan per kapita. Inisiatif pemerintah pada masa Orde Baru dipusatkan pada kegiatan ekonomi nasional, terutama untuk menekan inflasi, mempertahankan keuangan negara, dan memenuhi tuntutan masyarakat. Selanjutnya Kabinet AMPERA menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1996 tentang Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta membuat kebijakan yang mengacu padanya (Lashley-trambulo, 2016). Debirokratisasi untuk mempercepat kegiatan ekonomi, kebijakan yang menghilangkan kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor yang macet, dan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan produsen kecil adalah beberapa di antaranya. Tindak lanjut pemerintah adalah menerapkan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Pelita (25–30 tahun), yang dilakukan secara rutin setiap lima tahun (Pembangunan Lima Tahun).

Orde Baru menjadikan kemajuan dan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utamanya melalui kebijakan dan struktur administrasi yang sangat dipengaruhi oleh militer tetapi termasuk nasihat ekonomi dari para ahli Barat. Di mana anggota DPR dan MPR sering diambil dari militer, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan pejabat tinggi, mereka tidak dapat berfungsi secara efektif. Di sektor yang distribusi PAD-nya bisa dibilang kurang adil karena 70% provinsi setiap tahun harus membayar ke Jakarta, akibat dari aksi ini banyak suara atau keinginan rakyat Indonesia yang tidak didengar oleh para wakil rakyat. Melalui jurnal atau artikel ini, kita akan belajar tentang sistem ekonomi pada masa Orde Baru yang penuh sejarah panjang dan dapat kita jadikan acuan bagi para pemimpin, agar tercipta kuran yang mapan dari pusat hingga ke pusat. daerah yang berjuang untuk memperlebar kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Indonesia yang dapat diperkirakan Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memastikan bagaimana pembangunan Indonesia akan dipengaruhi oleh ekonomi orde baru, serta bagaimana ekonomi akan pulih di bawah sistem baru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah seperangkat pedoman dan prosedur sistematis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sejarah, mengevaluasi atau menguji sumber-sumber penting, dan menyajikan temuan dalam "sintesis" (seringkali dalam bentuk tertulis). dari hasil yang diperoleh (garraghan, 1957:33).

Heuristik, atau pengumpulan sumber sejarah yang berkaitan dengan subjek atau tema penyelidikan sejarah, merupakan tahap pertama dari penelitian ini. Pada titik ini, penulis terlibat dalam sejumlah kegiatan seperti mencari, mengumpulkan, dan menyusun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah yang dipelajari melalui sumber-sumber tertulis seperti makalah yang membahas pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, artikel jurnal ilmiah, dan banyak lagi referensi lainnya.

Setelah heuristik diterapkan, metode berikutnya adalah kritik sumber. Karena tidak semua sumber yang ditemukan dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber dalam penulisan jurnal ini, maka harus diselidiki terlebih dahulu, kritik sumber mencoba menguji kebenaran dan lokasi sumber yang ditemukan.

Setelah kritik sumber, serangkaian fakta sejarah disimpulkan dari temuan. Historiografi, fase terakhir dari teknik penelitian sejarah, adalah fase terakhir dari proses ini. Penulisan informasi sejarah dari sumber terpercaya yang relevan dengan pokok bahasan yang diliput dan dihargai secara jujur sehingga dapat dirangkai menjadi suatu catatan sejarah yang kronologis. Esai ini berfungsi sebagai gambaran tahapan-tahapan historiografi.

Penulisan artikel ini merupakan hasil penelitian Pustaka (*library research*), maka semua data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya berasal dari

sumber tersebut. Dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang terkait dengan tujuan penulisan dan kemudian menganalisisnya sebagai solusi atas permasalahan yang muncul, analisis tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif. Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian Pustaka (bukan penelitian empiris) maka penggunaan hipotesis tidak diperlukan dalam penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Kalimat "Pertumbuhan Ekonomi", dengan kalimat "Pembangunan Ekonomi" memiliki arti yang berbeda. Untuk membuat makna setiap kalimat lebih jelas dan untuk menghindari ambiguitas dalam cara memahaminya. Pakar Soemitro Djojohadikusumo mengklaim bahwa istilah "pembangunan ekonomi" menggambarkan dinamika ekonomi yang hadir dalam sudut pandang neoklasik dan neokeynesian, di mana pertumbuhan ekonomi dipahami mengacu pada isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diuraikan model atau rencana pembangunan ekonomi.

Model struktural menitikberatkan pada perubahan struktur, sistem tertentu, berbagai pranata atau pranata sosial yang ada dalam masyarakat dan kehidupan demokrasi yang ada sebelum pembangunan ekonomi dilakukan dengan harapan mereduksi pihak-pihak yang terlibat. Model neoklasik, di sisi lain, berfokus pada perubahan institusi yang ada di masyarakat dan kehidupan demokrasi yang ada sebelum pembangunan ekonomi dilakukan. Di sisi lain, model neoklasik menunjukkan bahwa ketika pembangunan dilakukan dalam skala luas, kesejahteraan sosial akan tercapai secara alami (industrialisasi).

Perkembangan Orde Baru sebagai reaksi terhadap kecondongan ideologis dan keruntuhan finansial Orde Lama. Soekarno membagi negara-negara dunia menjadi nefo dan oldefo, dan poros Jakarta-Peking-Pyongyang tercipta pada masa perang dingin antara blok barat dan blok timur, dengan Indonesia lebih condong ke blok timur. Orang-orang menganggap kegagalan ekonomi mandiri yang dicetuskan Soekarno dalam dekon 1963 sangat mirip karena dalam diskusi, Soekarno memfitnah IMF (International Monetary Fund) dengan kalimat "Pergi Ke Neraka Dengan Bantuan Anda!" (Zulkarnain et al., n.d.).

Ketika Negara masih dibenamkan dalam dualisme Soekarno-Soeharto, Orde Baru pertama kali mulai terbentuk pada seminar II TNI/AD yang diselenggarakan di SESKOAD Bandung pada tanggal 25–31 Agustus 1966. Ungkapan "Orde Baru" adalah awalnya dimaksudkan untuk membedakan garis demarkasi dari mentalitas Orde Lama. Secara umum, itu adalah sistem politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dengan pedoman operasional khusus yang termasuk dalam ketentuan MPRS dari Majelis Umum IV. Namun menurut A. Umar Said, kenyataannya adalah pemerintahan yang berkuasa yang diperintah oleh kekuatan militer.

Tampaknya Orde Baru cenderung menggunakan model ekonomi neoklasik dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi, yang didorong oleh keinginan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi negara-negara di dunia pertama sebagai akibat dari kelompok perkeonomian dunia. Era Soekarno, di mana produksi dan investasi menurun pada 1950-an dan program utang luar negeri. Para pejabat tinggi pada masa Orde Baru terinspirasi untuk meniru keberhasilan Marshall Plan dalam keberhasilan rekonstruksi Eropa.

Ketika menjabat sebagai menteri perdagangan pada masa Orde Baru, ketika gagasannya tentang industrialisasi benar-benar terwujud, Sumitro mencetuskan industrialisasi pada 1950 dalam skala kecil, menengah, dan besar. Di masa lalu, ia memperoleh gelar doktor dari Sekolah Ekonomi Belanda, Rotterdam, pada tahun 1943. Dengan memecah ekonomi ke dalam periode waktu yang berbeda, seperti boom minyak, liberalisasi ekonomi, dan pemulihan ekonomi, ekonomi era Orde Baru, yang berlangsung

dari tahun 1966 hingga 1998, dapat dipahami dengan mudah dan ringkas. guna memudahkan terbentuknya pemahaman dan pengertian yang sistematis tentang pembangunan ekonomi sepanjang masa Orde Baru.

Pemulihan Ekonomi Setelah Terjadi Kemerosotan Yang Sangat Memprihatinkan

Kesengsaraan ekonomi Orde Lama sangat membebani Orde Baru dan dapat dipandang sebagai warisan; Akibatnya, Orde Baru dengan cepat mengesahkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berikutnya (UU PMA). UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1968. 4 Pada intinya, kedua kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan investor domestik dan internasional berbagai pilihan investasi di Indonesia sekaligus mendorong industri di bawah Orde Baru.(Zulkarnain et al., n.d.)

Segera setelah dikeluarkannya peraturan investasi tersebut di atas, terjadi ekspansi ekonomi yang membuahkan hasil yang nyata. Sekitar tahun 1960, meningkat sekitar 1,4% selama setahun dan untuk total 5 tahun. Penambahan kemudian bertanggung jawab atas peningkatan 3,7% menjadi 12%. Meskipun sektor pembangunan bertujuan untuk mencapai hasil yang sangat baik atau pertumbuhan yang signifikan, perdagangan, transportasi, dan industri berkembang lambat, dan persentase PDB mereka meningkat dari 9% menjadi 12%. Pengeluaran untuk investasi meningkat dari 5% menjadi 20% pada tahun 1973. Sebagai akibat dari strategi yang tidak direvisi ini, pembangunan irigasi, transportasi, energi, dan komunikasi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan menjadi atau istilah boom, yang menunjukkan bukan karena sebab atau efek. Peristiwa MALARI merupakan kegiatan intelektual atau mahasiswa pada tanggal 14 Januari 1974 yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Mereka memprotes investasi besar-besaran Suharto (Malam Lima Belas Januari).

Kebijakan neoklasik menunjukkan bahwa kebijakan neoklasik melalui industrialisasi besar-besaran pada pemerintahan Orde Baru menjadi kutukan bagi Negara Indonesia karena semakin sedikit tenaga kerja dan semakin banyak teknologi yang digunakan untuk pekerjaan manusia, sehingga semakin sempit waktu lapangan dalam industri, semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang meledak pada akhirnya tidak tertampung dan dialihkan ke sektor pertanian. Masalah lain yang terjadi adalah semakin kecilnya lahan pertanian maka pendapatan masyarakat juga semakin berkurang. Kekayaan negara itu begitu melimpah dengan harga minyak dunia pada masa oil boom, yang dianggap sebagai puncak Orde Baru saat itu. Indonesia mampu menghasilkan sekitar 1,3 juta barel per hari pada tahun 1973. Akibatnya, industri minyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap situasi ini, menyumbang 62%-67% dari pendapatan negara. 6 Ekonomi tumbuh sebesar 7,8% selama periode ini, dan subsidi impor sedang dikembangkan untuk angkatan kerja industri pertanian.(Baharuddin, 2017)

Pemerintah meningkatkan gaji pegawai negeri hingga tiga kali lipat, membangun 30.000 jamban dan 15.000 sumber udara di daerah pedesaan, serta memperoleh dana dan dukungan publik yang signifikan. Pembangunan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperbaiki struktur pasar, mengembangkan kawasan transmigrasi, dan memperhatikan pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada periode ini. Namun, seperti halnya manusia, tingginya kemajuan perilaku korupsi era Orde Baru tidak berarti korupsi sama sekali tidak terjadi selama itu. 7 Kebangkrutan Pertamina pada tahun 1975–1976 meninggalkan hutang yang sangat besar. Mahasiswa yang memojokkan Suharto untuk mengusut korupsi tidak melakukan tindakan sekecil apa pun, dan pada tahun 1990 publik tidak pernah disadarkan akan adanya penyimpangan dalam APBN 1988/1989(Zulkarnain et al., n.d.) .Liberalisasi ekonomi di bawah pemerintahan Suharto terlihat antara lain di sektor manufaktur, pertanian, dan pangan. Istilah "liberalisasi" yang lebih tepat untuk kawasan industri merujuk pada kebijakan pemerintah

yang lebih berorientasi pada investor dalam mendukung keuntungan produksinya, seperti kontes UU No., ketika kekuasaan berada di tangan investor.

Indonesia, yang bisa dibilang merupakan perkawinan antara strategi ekonomi neoklasik yang sangat liberal dan pemerintahan yang otoriter, menggunakan upah rendah seperti itu untuk investor entitas ke negara tersebut. Dalam hal pupuk dan pestisida kimia, kebijakan penanaman modal asing Orde Baru dapat dianggap sebagai liberalisasi industri pertanian. 8 Dan sementara Indonesia telah mencapai swasembada berkat revolusi hijau sejak tahun 1970, ada faktor lain yang berperan, yaitu pertanian berbasis teknologi industri berupa pupuk dan pestisida, yang bermasalah. Karena penetapan harga yang lebih tinggi oleh pabrik daripada pengusaha ini, pendekatan ini akhirnya masuknya investasi asing di bidang pertanian dan pertumbuhan industri pupuk, yang kini didominasi oleh bisnis multinasional seperti Syngenta dan Monsanto. Kemudian, liberalisasi juga berdampak pada produk pangan karena PT. Pabrik Tepung Bogasari diberikan izin untuk menggunakan dan memproduksi tepung terigu dalam negeri. Seseorang dapat mengklaim bahwa bisnis atau barang tersebut memiliki monopoli. Selain itu, melalui PT Indofood Sukses Makmur, PT Bogasari Flour Mills memiliki kewenangan untuk mempengaruhi sektor hilir, yang meliputi pembuatan makanan cepat saji dan makanan ringan dengan bahan utama tepung terigu (Zulkarnain et al., n.d.). Masyarakat sulit menerima penerapan harga komoditas dan barang lain yang sewenang-wenang akibat dominasi bisnis hulu hingga hilir.

Ekonomi Indonesia berada di ambang ledakan di hampir semua bidang pada tahun 1989, menurut pengamatan Mackie dan Sjahrir tentang operasinya pada akhir 1980-an. Manfaat dari beberapa prakarsa deregulasi yang dilaksanakan antara tahun 1986 dan 1988 sudah terlihat, terutama ketika sektor swasta terlibat. Produksi barang-barang dengan fokus ekspor meningkat ke tingkat yang sebelumnya tidak pernah terdengar, sistem keuangan mengalami likuiditas yang luar biasa, panen tahun 1989 luar biasa, dan industri bangunan mulai berkembang pada tingkat yang sehat. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 1987-1992 adalah 6,7%, dan kondisi ini dimungkinkan tanpa kontribusi yang signifikan dari keuntungan minyak (Maksimenko, 1968). Indonesia telah menjadi eksportir industri besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, selama ini, sektor komersial mendapatkan lebih banyak cloud dan sektor swasta menjadi lebih mandiri, sementara pengaruh BUMN mulai menurun. Akibatnya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk memacu pertumbuhan di lingkungan ekonomi yang tidak menguntungkan, terutama sebagai akibat dari penurunan pendapatan minyak dan persaingan ketat dari negara-negara Asia lainnya.

Dampak Perekonomian Orde Baru Terhadap Pembangunan di Indonesia

A. Pemerataan Pelayanan Publik di Indonesia

Pemerintahan bendungan layanan publik di Indonesia telah berkembang secara dramatis sejak Orde Baru mengambil alih kekuasaan. Jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor perumahan, transportasi, kesejahteraan sosial, dan kesehatan meningkat dari Rp. 414,3 miliar di Pelita I menjadi Rp. 12.244,6 miliar pada tahun 1969 harga konstan di Pelita IV, meningkat 300%(Fareza, 2016).

B. Hasil-hasil Pembangunan Dalam Pembangunan Jangka Panjang

1. Swasembada Beras

Produksi beras meningkat secara signifikan dari tahun 1968 hingga tahun 1992. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dan pencapaian tahun ini juga akan berada dalam lima tahun sebelumnya hingga Akhirnya Repelita V dapat tetap dipertahankan berkat prestasi yang luar biasa, terutama di daerah ini. Pada tahun 1970-an, Indonesia merupakan importir terbesar dunia. Selain itu, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan

dipengaruhi oleh pengaruh signifikan makanan selama ini (Fareza, 2016).

2. Kesejahteraan Penduduk

Strategi yang menekankan pada pertanian disertai dengan pemerataan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, promosi keluarga berencana, penyediaan akses pendidikan dasar, penyediaan air bersih, penyediaan perumahan sederhana, dan lain sebagainya. Setiap Repelita, taktik ini terus digunakan. Pemerintah telah berhasil mengentaskan kemiskinan di negara ini dengan kebijakan ini. Akibatnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih sedikit. Dari setiap 100 orang, 60 di antaranya miskin pada 1970-an. Sekitar 55 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, yang merupakan jumlah yang cukup besar (Fareza, 2016). Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya.

3. Masyarakat Tinggal Landas

Dimungkinkan untuk mendefinisikan lepas landas sebagai industri dalam kata-kata dasar. Karena mengelola dan memanfaatkan teknologi masa kini, industri bangsa bisa berkembang. Selain itu, penggunaan teknologi kontemporer dimungkinkan oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai, yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasional.

Meski jumlah orang miskin turun sepanjang Orde Baru, perekonomian dan masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk melebar. Pemerintah sebenarnya sangat menyadari masalah ini. Ide politik “Trilogi Pembangunan” (tiga prasyarat yang erat kaitannya dan saling menguatkan dan mendukung) telah berhasil memasukkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia di era Orde Baru. Prasyarat tersebut bahkan adalah bangsa yang stabil dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah juga menyadari bahwa pengentasan kemiskinan tidak selalu melalui politik karena situasi politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pentingnya upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara jelas tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kemiskinan, atau untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak trade off (pertukaran) antara pertumbuhan dan/atau kemiskinan. Selain itu, dalam Repelita VI, fokus kebijakannya bergeser dari pertumbuhan saja ke pertumbuhan dengan pemerataan.

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda sejak akhir Orde Lama, yaitu dari ekonomi tertutup berorientasi sosialis di bawah rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang dikapitalisasi di bawah era Suharto. Kinerja perekonomian nasional di bawah pemerintahan Orde Baru secara signifikan lebih baik daripada di bawah pemerintahan Orde Lama sebagai akibat dari perubahan kebijakan ekonomi ini.

Pengalaman ini menunjukkan, bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut.

- a. Kemauan politik yang kuat. Membangun perekonomian Indonesia merupakan prioritas politik utama bagi Presiden Suharto. Pemerintah dan masyarakat umum masih memiliki rasa nasionalisme yang kuat pada masa Orde Lama, kemungkinan sebagai akibat dari kemerdekaan Indonesia baru-baru ini. Mereka ingin lebih dulu menekankan kebesaran bangsa kepada kelompok bangsa Barat melalui pembangunan proyek mercusuar dan kekuatan militer.
- b. Stabilitas ekonomi dan politik Orde Baru berhasil menurunkan inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya 5% menjadi 10% pada awal tahun 1970-an. Karena kemajuan ekonomi dan sosial adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, pemerintah Orde Baru juga tidak senang tanpa dukungan negara dan organisasi masyarakat.
- c. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat membuat program dan strategi pembangunan dengan kebijakan yang sesuai dan mengelola ekonomi makro secara efektif jika memiliki sumber daya manusia yang baik.
- d. Sistem politik dan ekonomi yang terbuka dan berfokus pada Barat. Struktur politik dan ekonomi yang terbuka dan berfokus pada Barat diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru. Ini sangat bermanfaat, terutama untuk memperoleh pinjaman internasional, menarik investasi asing, dan mentransfer pengetahuan dan teknologi.
- e. Kondisi politik dan ekonomi global yang membaik Selain boom minyak, kondisi ekonomi dan politik global era Orde Baru secara signifikan lebih baik daripada Orde Lama, terutama setelah berakhirnya Perang Vietnam atau bahkan lebih setelah berakhirnya Perang Dingin. . Rezim Orde Baru bukannya tanpa kesalahan, meskipun memiliki kelebihan-kelebihan yang disebutkan di atas. Kebijakan ekonomi yang diambil pada masa Orde Baru sebenarnya telah mempercepat proses transformasi ekonomi dan meningkatkan laju pembangunan ekonomi, tetapi dengan biaya yang besar dan mengorbankan ekonomi yang secara fundamental lebih lemah. Yang terakhir terlihat, antara lain, di Indonesia yang semakin bergantung pada uang asing, termasuk kredit dan impor, dan keadaan sistem perbankan negara. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997

SIMPULAN

Pakar Soemitro Djojohadikusumo mengklaim bahwa istilah "pembangunan ekonomi" menggambarkan dinamika ekonomi yang hadir dalam sudut pandang neoklasik dan neokeynesian, di mana pertumbuhan ekonomi dipahami mengacu pada isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Model struktural menitikberatkan pada perubahan struktur, sistem tertentu, berbagai pranata atau pranata sosial yang ada dalam masyarakat dan kehidupan demokrasi yang ada sebelum pembangunan ekonomi dilakukan dengan harapan mereduksi pihak-pihak yang terlibat. Tampaknya Orde Baru cenderung menggunakan model ekonomi neoklasik dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi, yang didorong oleh keinginan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi negara-negara di dunia pertama sebagai akibat dari kelompok perekonomian dunia. Dengan memecah ekonomi ke dalam periode waktu yang berbeda, seperti boom minyak, liberalisasi ekonomi, dan pemulihan ekonomi, ekonomi era Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, dapat dipahami dengan mudah dan ringkas.

Kesengsaraan ekonomi Orde Lama sangat membebani Orde Baru dan dapat dipandang sebagai warisan; Akibatnya, Orde Baru dengan cepat mengesahkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berikutnya (UU PMA). Meskipun sektor pembangunan bertujuan untuk mencapai hasil yang sangat baik atau pertumbuhan yang signifikan, perdagangan, transportasi, dan industri berkembang lambat, dan persentase PDB mereka meningkat dari 9% menjadi 12%. Sebagai akibat dari strategi yang tidak direvisi ini, pembangunan irigasi, transportasi, energi, dan komunikasi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan menjadi atau istilah boom, yang menunjukkan bukan karena sebab atau efek. Kebijakan neoklasik menunjukkan bahwa kebijakan neoklasik melalui industrialisasi besar-besaran pada pemerintahan Orde Baru menjadi kutukan bagi Negara Indonesia karena semakin sedikit tenaga kerja dan semakin banyak teknologi yang digunakan untuk pekerjaan manusia, sehingga semakin sempit waktu lapangan dalam industri, semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang meledak pada akhirnya tidak tertampung dan dialihkan ke sektor pertanian. Istilah "liberalisasi" yang lebih tepat untuk kawasan industri merujuk pada kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada investor dalam mendukung keuntungan produksinya, seperti kontes UU No., ketika kekuasaan berada di tangan investor. Indonesia, yang bisa dibilang merupakan perkawinan antara strategi ekonomi neoklasik yang sangat liberal dan pemerintahan yang otoriter, menggunakan upah rendah seperti itu untuk investor entitas ke negara tersebut. Karena penetapan harga yang lebih tinggi oleh pabrik daripada pengusaha ini, pendekatan ini akhirnya masuknya investasi asing di bidang pertanian dan pertumbuhan industri pupuk, yang kini didominasi oleh bisnis multinasional seperti Syngenta dan Monsanto. Produksi barang-barang dengan fokus ekspor meningkat ke tingkat yang sebelumnya tidak pernah terdengar, sistem keuangan mengalami likuiditas yang luar biasa, panen tahun 1989 luar biasa, dan industri bangunan mulai berkembang pada tingkat yang sehat.

Sejak tahun 1984, Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dan pencapaian tahun ini juga akan berada dalam lima tahun sebelumnya hingga Akhirnya Repelita V dapat tetap dipertahankan berkat prestasi yang luar biasa, terutama di daerah ini. Ide politik "Trilogi Pembangunan" (tiga prasyarat yang erat kaitannya dan saling menguatkan dan mendukung) telah berhasil memasukkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia di era Orde Baru. Prasyarat tersebut bahkan adalah bangsa yang stabil dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah juga menyadari bahwa pengentasan kemiskinan tidak selalu melalui politik karena situasi politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda sejak akhir Orde Lama, yaitu dari ekonomi tertutup berorientasi sosialis di bawah rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang dikapitalisasi di bawah era Suharto.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. (2017). Analisis Konsep Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru Perspektif Kapitalisme dan Islam. *Tesis*, 1–154.
- Dwicahyo, S. (2013). Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 176–179. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23707>
- Fareza, M. (2016). Dampak Kebijakan Perekonomian Era Orde Baru Terhadap Pembangunan di Indonesia. *Repository.Upy.Ac.Id*, 1–10. <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1203>
- Lashley-trambulo, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Maksimenko, L. A. (1968). Electronic device modelling certain mechanisms of inhibition

at the input of a multineurone reflex arc of the spinal cord. *Biophysics*, 13(1), 180–184.

Zulkarnain, M. E., Ilmu, T., Sosial, P., & Tulungagung, I. (n.d.). *Peran dan Kebijakan Zaman Orde Baru Dalam Sektor Ekonomi Indonesia*.